

Perencanaan Keuangan (Rapbs) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah dalam Pengembangan Sekolah di Smk Al Washliyah 9 Perbaungan

Khairani, Fachruddin Azmi, Sonia Purba Tambak, Dermawan Syahputra, Awaluddinsyah Siregar

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

khairani.0332224012@uinsu.ac.id, prof.dr.fachruddin@gmail.com
sonia.purbatambak@uinsu.ac.id, dermawan.syahputra@uinsu.ac.id
awaluddinsyah.siregar@uinsu.ac.id

ABSTRACT

The draft School Revenue and Expenditure Budget (RAPBS) is carried out through a process of managing school funds, of course involving various parties such as the school principal who regulates financial nets and their management is carried out by treasurers and other components that assist the process of implementing school finances. The purpose of this study was to analyze the implementation of financial planning (RAPBS) school income and expenditure budget plans in school development. This research was carried out with a qualitative approach using descriptive methods. Data collection techniques are observation, interviews and documentation as well as literature studies and group discussions. The results of this research are that the acceptance component of SMK Al Washliyah 9 Perbaungan is optimized by using educational funding sources, namely the existence of regular BOS funds sourced from APBN revenues. Reporting on the accountability of the RAPBS is carried out only to the extent of the school principal. And will be conveyed at the meeting with the parties involved in it. The principal submits a report, especially regarding school financial receipts and expenditures. Evaluation is carried out every quarter or per semester. The conclusion from this study is that good use of the RAPBS has made school development better, including: character education, human resource development and the use of technology.

Keywords: *RAPBS; Accountability; Development*

ABSTRAK

Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah (RAPBS) dilaksanakan melalui proses pengelolaan dana sekolah tentunya melibatkan berbagai pihak seperti kepala sekolah yang mengatur jalanya keuangan dan pengelolanya dilakukan oleh bendahara serta komponen lainnya yang membantu proses pelaksanaan keuangan sekolah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi perencanaan keuangan (RAPBS) rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah dalam pengembangan sekolah. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif dengan memakai metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi serta studi literatur dan diskusi kelompok. Hasil dari penelitian ini yaitu Dari komponen penerimaan SMK Al Washliyah 9 Perbaungan dioptimalkan menggunakan sumber pendanaan pendidikan yaitu adanya dana bos regular yang bersumber dari pendapatan APBN. Pelaporan pertanggungjawaban RAPBS nya dilakukan hanya

sebatas kepala sekolah saja. Dan akan disampaikan pada saat rapat dengan pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Kepala sekolah menyampaikan laporan terutama mengenai penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah. Pengevaluasian dilakukan setiap triwulan atau per semester. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pemanfaatan RAPBS yang baik telah membuat perkembangan sekolah menjadi lebih baik, diantaranya: pendidikan karakter, pengembangan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi.

Kata kunci: RAPBS; Pertanggungjawaban; Pengembangan

PENDAHULUAN

Sekolah yang dituntut untuk menampung berbagai kegiatan dengan membutuhkan anggaran, maka diperlukan suatu Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah (RAPBS) untuk mengatur sistem keuangan. Pengaturan sistem keuangan sangat dipentingkan dengan bertujuan membenuk suatu sekolah yang unggul dalam berbagai hal dan memudahkan pengguna yaitu siswa untuk mendapatkan suatu fasilitas pembelajaran yang lebih baik. Manajemen keuangan harus dikelola dengan baik, karena terkait dengan hubungan dalam pelaksanaan kegiatan sekolah, sehingga dalam pengelolaan dana dapat diterapkan dengan secara profesional dan jujur. Pengelolaan keuangan sekolah sebenarnya sudah diterapkan dengan baik, hanya saja kadar tingkatan pelaksanaannya berbeda antara satu sekolah satu dengan sekolah lainnya. Keragaman permasalahan pengelolaan keuangan sekolah tergantung pada kondisi fisik sekolah, kondisi geografis sekolah dan citra sekolah. Sekolah yang sangat diminati oleh masyarakat pengelolaannya jauh berbeda dengan sekolah yang kurang diminati masyarakat, karena sekolah harus mampu menampung keseluruhan kegiatan yang semakin banyak yang dituntut oleh masyarakat.

Banyak sekolah yang kurang terbuka terhadap sistem pengelolaan keuangan sekolah kepada masyarakat, sehingga berakibat adanya tuduhan penyelewengan dana terhadap sekolah. Orang tua siswa mengeluhkan banyaknya biaya pembayaran sekolah terkesan mahal tanpa melakukan sosialisasi terlebih dahulu mengenai pungutan dana sekolah. Masyarakat terkadang menilai bahwa biaya sekolah terlalu berat dipenuhi, bahkan bagi masyarakat yang tidak mampu, karena pendidikan bukan lagi sebagai kebutuhan primer dengan biaya terjangkau. Berbagai macam pungutan liar kerap kali terjadi di sekolah dengan berbagai macam pungutan dana yang tidak masuk akal. Diantara alasan yang paling sering dijadikan tameng dalam melancarkan aksi penyimpangan tersebut anatara lain, demi meningkatkan kualitas, untuk menambah fasilitas, yang melibatkan stakeholders sekolah demi melancarkan aksi tersebut. Hal ini merupakan sebuah konsekuensi logis dari upaya mencapai standar mutu pendidikan yang telah direncanakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan ruang gerak yang luas dalam berkerasi guna msingkatkan eksistensinya di tingkat nasional.

Proses pengelolaan dana sekolah tentunya melibatkan berbagai pihak seperti kepala sekolah yang mengatur jalanya keuangan dan pengelolaanya dilakukan oleh bendahara serta komponen lainnya yang membantu proses pelaksanaan keuangan sekolah. Pengalaman praktis sekolah dalam mengelola anggaran, harusnya menjadi masukan dalam merancang proses penganggaran, penatausahaan dan petanggungjawaban anggaran yang mengakomodasikan aspirasi

dan sumber daya pemangku kepentingan. Pengembangan model pengelolaan keuangan sekolah tidak cukup hanya dikembangkan sebatas pada pengelolaan APBD. Partisipasi masyarakat harus perlu dijadikan dasar dalam memahami masalah kebutuhan pendidikan serta dukungan pemenuhan anggaran pendidikan. Uang dalam kaitannya proses pendidikan, termasuk sumber daya esensial dan terbatas. Atas dasar asumsi itulah, uang perlu dikelola secara efisien agar tidak menghambat upaya dalam mencapai tujuan pendidikan. Permasalahannya terkadang bahwa, penerapan peraturan pembiayaan yang baku bersifat serampangan atau tidak sesuai dengan yang tertulis dalam rencana strategis lembaga pendidikan. Dari permasalahan tersebut hendaknya lembaga pendidikan perlu dikelola dengan baik dengan tata kelola manajemen yang baik, sehingga menjadikan lembaga pendidikan yang bersih, transparan dan kredibel dari berbagai penyelewengan yang merugikan pendidikan itu sendiri.

Tugas pengelola pendidikan menjadi sangat berat dengan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas keuangan yang harus dipublikasikan di media, demikian pula dalam memutuskan besaran biaya pendidikan kepada peserta didik harus dikomunikasikan kepada orang tua, karena mekanisme ini sangat baik dalam rangka menjaga akuntabilitas akademik maupun non akademik. Terkait hal tersebut, dibutuhkan model yang memadai dalam penyampaian informasi keuangan sekolah kepada pihak yang berkepentingan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan sekolah. Salah satu hasil positif dari pengelolaan RAPBS yang sesuai dengan aturan yang semestinya dapat melakukan pengembangan madrasah menjadi lebih baik. Kedepannya, pengembangan madrasah dalam konteks pendidikan Islam menjadi semakin penting di era digital ini. Madrasah memiliki peran strategis dalam membangun karakter dan memberikan pendidikan agama yang berkualitas kepada generasi muda Muslim.

Namun, tantangan yang dihadapi oleh madrasah juga semakin kompleks dengan perkembangan teknologi informasi dan transformasi sosial yang pesat. Madrasah harus mampu menghadapi perubahan dan memanfaatkan potensi positif teknologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Era digital memberikan peluang baru untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan aksesibilitas pembelajaran di madrasah. Namun, hal ini juga menghadirkan tantangan dalam mengelola perubahan, mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran, serta mempersiapkan siswa untuk menghadapi perubahan dalam masyarakat yang semakin terhubung secara global. Selain itu, pentingnya pendidikan karakter dalam madrasah tidak bisa diabaikan. Madrasah tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan agama kepada siswa, tetapi juga bertanggung jawab dalam membentuk akhlak dan moral yang baik. Pendidikan karakter merupakan landasan penting dalam pembentukan pribadi yang berkualitas, beretika, dan memiliki tanggung jawab sosial. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis tertarik mengangkat masalah ini sebagai penelitian dengan judul "Perencanaan Keuangan (RAPBS) Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah Dalam Pengembangan Sekolah Di SMK Al Washliyah 9 Perbaungan"

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif dengan memakai metode deskriptif. Sumber bahan penelitian adalah partisipan, tempat yang berlokasi di SMK Al Washliyah 9 Perbaungan yang merupakan salah satu satuan

pendidikan dengan jenjang SMK di Batang Terap, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai, Sumatera Utara dan dokumen- dokumen pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi serta studi literatur dan diskusi kelompok. Dalam penelitian ini analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sesuai standar validitas data. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi perencanaan keuangan (RAPBS) rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah dalam pengembangan sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian, fungsi dan tujuan RAPBS

Penganggaran yang diambil dari kata dasar anggaran, dapat didefinisikan sebagai kebutuhan dana/uang untuk suatu kegiatan atau program dalam suatu organisasi. *Governmental Accounting Standards Board (GASB)* (Akbar, 2013) mendefinisikan anggaran sebagai rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu. Sedangkan menurut Yuwono (Yuwono, 2010) anggaran merupakan titik fokus dari persekutuan antara proses perencanaan dan pengendalian. Menurut Harsono (Harsono, 2007) RAPBS adalah serangkaian rencana kegiatan sekolah yang meliputi aspek-aspek perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan belajar dan mengajar pada waktu tertentu pada waktu yang akan datang. Sedangkan menurut Abbudinata (Abbudinata, 2007) RAPBS adalah anggaran terpadu antara penerimaan dan penggunaan dana serta pengelolaannya dalam memenuhi seluruh kebutuhan sekolah selama satu tahun pelajaran berjalan. Dimana sumber dananya berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan orang tua/ wali peserta didik. Sumber dana perolehan dan pemakaian dana dipadukan dengan kondisi objektif kepentingan sekolah dan penyandang dana.

Jadi dapat disimpulkan, anggaran merupakan keseluruhan rincian biaya mengenai pendapatan dan belanja yang umumnya disusun rutin setiap tahun oleh suatu organisasi sebagai alat perencanaan maupun pengendalian. Penganggaran menjadi tahap yang sangat penting dalam sebuah organisasi, begitu juga dalam lembaga pendidikan seperti sekolah. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa perencanaan RAPBS berisi semua komponen manajemen anggaran, dari perencanaan hingga pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, ada tahap penyusunan, RAPBS disusun dengan pertimbangan yang matang. Adapun bila dirincikan fungsi RAPBS (Qomar, tt), sebagai berikut:

- 1) Pedoman pengumpulan dana dan pengeluarannya
- 2) Menggali dana secara kreatif dan maksimal
- 3) Menggunakan dana secara jujur dan terbuka
- 4) Mengembangkan dana secara produktif
- 5) Mempertanggungjawabkan dana secara objektif.

Adapun tujuan dari RAPBS (2016), adalah sebagai berikut:

1. Sebagai dasar dalam menjalankan program dan kegiatan satuan pendidikan.
2. Sebagai alat evaluasi dan pengukuran kinerja bagi keberhasilan dalam mencapai visi, misi dan tujuan satuan pendidikan

3. Sebagai dasar bagi orang tua, wali murid, masyarakat dan stakeholders lainnya untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan pemberdayaan satuan pendidikan.

Dari penjelasan diatas Maka dapat dipahami bersama bahwa RAPBS ini akan membantu kemajuan lembaga pendidikan yang dipimpin tersebut dan untuk itu, setiap sekolah harus menyusun RAPBS sebagai acuan kegiatan yang terkait dengan pendanaan. Sebenarnya, dengan adanya RAPBS ini, sekolah dapat mengeksplorasi kemampuan dirinya dan menyeimbangkan dengan alokasi dana yang ada. Dengan cara ini, setiap program sekolah sudah *terback up* dalam RAPBS tersebut.

B. Bentuk-Bentuk Anggaran RAPBS

1. Anggaran Pendapatan

Sumber keuangan atau pembiayaan pada suatu sekolah secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi beberapa sumber sebagai berikut:

a. Dana dari pemerintah.

Baik dana dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun keduanya dan dana tersebut diperuntukkan demi kepentingan pendidikan.

b. Dana dari orang tua siswa

Pendanaan dari orang tua siswa ini dikenal dengan iuran komite. Besarnya sumbangan dan ayang harus dibayarkan oleh orang tua siswa ditentukan oleh rapat komite sekolah. Pada umumnya dana komite terdiri atas:

- 1) Dana tetap tiap bulan sebagai uang kontribusi yang harus dibayar oleh orang tua setiap bulan selama anaknya menjadi siswa di sekolah.
- 2) Dana insidental yang dibebankan kepada siswa yang baru yang biasanya hanya satu kali selama tiga tahun menjadi siswa (pembayarannya dapat diangsur).
- 3) Dana suka rela yang biasanya ditawarkan kepada orang tua siswa tertentu yang dermawan dan bersedia memberikan sumbangan secara suka rela tanpa suatu ikatan apapun.

c. Dana dari masyarakat

Dana ini biasanya merupakan sumbangan sukarela yang tidak mengikat dari anggota anggota masyarakat sekolah yang menaruh perhatian terhadap kegiatan pendidikan di suatu sekolah. sumbangan suka rela yang diberikan tersebut merupakan wujud kepeduliannya karena merasa terpanggil untuk turut membantu kemajuan pendidikan.

d. Dana dari Alumni

Dana ini merupakan bantuan dari para alumni untuk membantu peningkatan mutu sekolah yang tidak selalu dalam bentuk uang (misalnya buku-buku, alat dan perlengkapan belajar). Namun dana yang dihimpun oleh sekolah dari para alumni merupakan sumbangan sukarela yang tidak mengikat dari mereka yang merasa terpanggil untuk turut mendukung kelancaran kegiatan-kegiatan demi kemajuan dan pengembangan sekolah. Dana ini ada yang diterima langsung dari alumni, tetapi ada juga yang dihimpun melalui acara reuni atau lustrum sekolah.

e. Dana dari Peserta kegiatan

Dana ini dipungut dari siswa sendiri atau anggota masyarakat yang menikmati pelayanan kegiatan pendidikan tambahan atau ekstrakurikuler, seperti pelatihan komputer, kursus bahasa Inggris atau keterampilan lainnya.

f. Dana dari kegiatan wirausaha sekolah (Suryobroto, 2004)

Ada beberapa sekolah yang mengadakan kegiatan usaha untuk mendapatkan dana. Dana ini merupakan kumpulan hasil berbagai kegiatan wirausaha sekolah yang pengelolaannya dapat dilakukan oleh staf sekolah atau para siswa misalnya perasi, kantin sekolah, bazaar tahunan, wartel, usaha fotokopi, dan lainnya.

2. Anggaran Belanja

Secara garis besar, pengeluaran dari suatu sekolah/madrasah dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Pembiayaan rutin

Pembiayaan rutin adalah biaya (anggaran) yang harus dikeluarkan secara rutin dan pasti dari tahun ke tahun, seperti gaji pegawai (guru dan non guru), biaya operasional, biaya pemeliharaan gedung, fasilitas dan alat pengajaran.

b. Pembiayaan pembangunan (Qomar, tt)

Pembiayaan pembangunan misalnya biaya pembelian atau pengembangan tanah, pembangunan gedung, perbaikan gedung, dan penambahan furniture dan juga hal-hal lainnya.

Selain penggunaan dua macam dana di atas ada satu lagi yang harus dialokasikan, yaitu anggaran untuk kebutuhan atau kepentingan sosial, baik bantuan sosial ke dalam maupun ke luar. Bantuan ke dalam dapat berupa dana untuk wirausaha sekolah sendiri. Sementara itu, bantuan sosial ke luar seperti untuk bencana alam, perayaan HUT RI, permohonan sumbangan dari luar, dan sebagainya.

C. Prinsip-Prinsip Penyusunan RAPBS

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) harus berdasarkan pada rencana pengembangan sekolah dan merupakan bagian dari rencana operasional tahunan. RAPBS setidaknya meliputi penganggaran untuk kegiatan pengajaran, materi, pengembangan profesi guru, renovasi bangunan sekolah, pemeliharaan, buku, meja dan kursi. Penyusunan RAPBS tersebut harus melibatkan kepala sekolah, guru, komite sekolah, staf dan komunitas sekolah. RAPBS perlu disusun pada setiap tahun ajaran sekolah dengan memastikan bahwa alokasi anggaran bisa memenuhi kebutuhan sekolah secara optimal.

Prinsip-prinsip dalam penyusunan RAPBS (Indonesia, 2012) adalah:

1. RAPBS harus benar-benar difokuskan pada peningkatan pembelajaran murid secara jujur, bertanggung jawab dan transparan.
2. RAPBS harus ditulis dalam bahasa yang sederhana dan jelas, dan dipajang di tempat terbuka di sekolah.
3. Dalam menyusun RAPBS, sekolah sebaiknya secara saksama memprioritaskan pembelanjaan dana sejalan dengan rencana pengembangan sekolah.

Hal penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan RAPBS (Makin, 2010) adalah harus adanya pemenuhan biaya yang diperlukan untuk melaksanakan

kegiatan sekolah dan madrasah setiap tahunnya. RAPBS ini pun dituntut mencakup semua anggaran kegiatan rutin dan biaya penting lainnya, agar kesemuanya itu dapat dilaksanakan satu tahun.

D. Langkah - Langkah Penyusunan RAPBS

Suatu hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RAPBS (Fatah, 2004) adalah harus menerapkan prinsip anggaran berimbang, artinya rencana pendapatan dan pengeluaran harus berimbang diupayakan tidak terjadi anggaran pendapatan minus. Dengan anggaran berimbang tersebut maka kehidupan sekolah akan menjadi solid dan benar-benar kokoh dalam hal keuangan, maka sentralisasi pengelolaan keuangan perlu difokuskan pada perbendaharaan sekolah dalam rangka untuk mempermudah pertanggungjawaban keuangan.

Penyusunannya hendaknya mengikuti langkah-langkah berikut (Fatah, 2004)

1. Menginventarisasi rencana yang akan dilaksanakan.
2. Menyusun rencana berdasar skala prioritas pelaksanaannya.
3. Menentukan program kerja dan rincian program.
4. Menetapkan kebutuhan untuk pelaksanaan rincian program.
5. Menghitung dana yang dibutuhkan.
6. Menentukan sumber dana untuk membiayai rencana.

Rencana tersebut setelah dibahas dengan pengurus dan komite sekolah, maka selanjutnya ditetapkan sebagai anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS). Pada

setiap anggaran yang disusun perlu dijelaskan apakah rencana anggaran yang akan dilaksanakan merupakan hal baru atau kelanjutan atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya dengan menyebut sumber dana sebelumnya.

Jumlah anggaran untuk masing-masing rincian program, program, rencana kegiatan, dan total anggaran untuk seluruh rencana kegiatan dan sumber dana yang mendukung. Didalam pembuatan rencana anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS) melibatkan beberapa unsur diantaranya (Suryobroto, 2004):

1. Pihak sekolah
2. Orang tua murid dalam wadah komite sekolah
3. Dinas pendidikan kota
4. Pemerintah kota maupun provinsi

Semua komponen ini adalah pihak-pihak yang terkait langsung dengan operasional sekolah sesuai kependudukan dan kapasitas. Jadi dapat dilihat langkah-langkah yang harus ditempuh oleh sekolah (Fatah, 2004) adalah:

1. RAPBS disusun oleh sekolah dan pengurus BP3/komite sekolah
2. Setelah selesai dirumuskan selanjutnya RAPBS dikirim ke kantor Departemen Pendidikan nasional kota atau Dinas Pendidikan Kota untuk mendapatkan persetujuan.
3. Oleh pemerintah RAPBS diteliti di Kandep Diknas oleh pengawas dan kasubag keuangan serta kasubag PRP, serta subag yang relevan, kemudian di kirim kembali kesekolah setelah mendapat revisi.
4. Sekolah mengadakan rapat dengan BP3 atau komite sekolah
5. RAPBS disetujui oleh sekolah setelah mendapat kesepakatan dalam rapat anggota BP3 atau komite sekolah

6. RAPBS berubah menjadi APBS setelah disahkan oleh kepala KandeP Diknas kota atau kepala Dinas Pendidikan kota.
7. APBS yang sudah sisahkan dikirim kembali ke sekolah dan APBS ini yang dijadikan acuan pembiayaan sekolah
8. Rekapitulasi ini dikirim ke wali kota dan
9. Rekapitulasi di kirim ke Diknas provinsi.

E. Pertanggung Jawaban RAPBS

Kepala sekolah wajib menyampaikan laporan di bidang keuangan terutama mengenai penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah. Pengevaluasian dilakukan setiap triwulan atau per semester. Dana yang digunakan akan dipertanggung jawabkan kepada sumber dana. Jika dana tersebut diperoleh dari orang tua siswa, maka dana tersebut akan dipertanggung jawabkan oleh kepala sekolah kepada orang tua siswa. (Indonesia, 2012)

F. Konsep Manajemen Pendidikan Islam Dalam Pengembangan Madrasah

Prinsip Manajemen Pendidikan Islam Manajemen Pendidikan Islam adalah suatu konsep yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi dalam rangka mengelola lembaga pendidikan Islam, seperti madrasah, dengan tujuan untuk mencapai kualitas pendidikan yang optimal. Konsep ini berfokus pada pengelolaan secara efektif dan efisien dalam konteks pendidikan Islam. Diantara prinsip manajemen pendidikan Islam, yaitu:

- a) Prinsip Keterpaduan: Manajemen Pendidikan Islam harus melibatkan berbagai elemen yang terkait, seperti kurikulum, tenaga pendidik, siswa, orang tua, dan masyarakat sekitar. Keterpaduan ini penting agar terjadi sinergi antara semua komponen dalam mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan.
- b) Prinsip Keselarasan: Manajemen Pendidikan Islam harus sejalan dengan nilai-nilai Islam, ajaran agama, dan prinsip-prinsip Islam dalam setiap kegiatan pendidikan. Hal ini melibatkan pengintegrasian nilai-nilai moral dan etika Islam dalam pengembangan kurikulum, metode pengajaran, dan tata kelola madrasah.
- c) Prinsip Kesetaraan: Manajemen Pendidikan Islam harus menghormati hak-hak setiap individu yang terlibat dalam proses pendidikan, tanpa memandang perbedaan latar belakang sosial, budaya, atau ekonomi. Prinsip ini menekankan pentingnya memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.
- d) Prinsip Partisipasi: Manajemen Pendidikan Islam harus melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak yang terkait, termasuk tenaga pendidik, siswa, orang tua, dan masyarakat. Partisipasi ini melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan pendidikan untuk mencapai tujuan bersama.
- e) Prinsip Pengembangan Berkelanjutan: Manajemen Pendidikan Islam harus berfokus pada pengembangan terus-menerus dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Prinsip ini melibatkan peningkatan kompetensi tenaga pendidik, pengembangan kurikulum yang relevan, penggunaan metode pengajaran yang inovatif, dan penerapan teknologi pendidikan yang efektif.

G. Implementasi Perencanaan Keuangan (RAPBS) Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah Dalam Pengembangan Sekolah di SMK Alwasliyah 9 Perbaungan.

1. Bentuk Anggaran RAPBS Di SMK Al Washliyah 9 Perbaungan

SMK Al Washliyah 9 Perbaungan mempunyai RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah) sebagai system atau prosedur dalam melaksanakan anggaran sekolah, termasuk pembiayaan sekolah. RAPBS mempunyai dua komponen yaitu penerimaan dan pengeluaran. Dari komponen penerimaan SMK Al Washliyah 9 Perbaungan dioptimalkan menggunakan sumber pendanaan pendidikan yaitu adanya dana bos regular yang bersumber dari pendapatan APBN. Di sisi lain SMK Al Washliyah 9 Perbaungan memerlukan biaya yang banyak untuk melaksanakan progam pendidikannya. Yang paling utama adalah digunakan untuk menyelenggarakan dan memperbaiki pengembangan fasilitas pembelajaran. Permendiknas No 78 Th 2009 memberikan rambu-rambu dengan keterbatasan pendanaan sekolah maka pihak sekolah pun mempunyai hak untuk melakukan pungutan biaya pendidikan kepada orang tua siswa.

Adapun aturan yang berlaku tentunya menjadi pedoman bagi SMK Al Washliyah 9 ini untuk melakukan penarikan dari orang tua siswa unuk penyelenggara Pendidikan dari SPP. Akan tetapi dana BOS Regular yang besifat pendamping untuk penunjang kegiatan pembelajaran sudah berdasarkan juknis realisasinya sesuai komponen yang telah ditentukan guna pembayaran uang bulanan yang tepat waktu. Dengan system demikian sekolah dapat merencanakan pemasukan sesuai dengan keadaan pendanaan tersebut. Manajemen pembiayaan di SMK Al Washliyah 9 dilakukan dengan dua komponen yang meliputi pencatatan anggaran yang akan dilakukan dan pelaksanaan anggaran yang direncanakan. Berkaitan dengan pencatatan anggaran penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh bendahara SMK Al Washliyah 9 yang juga merupakan tenaga pendidik yang hanya melakukan system akuntansi yang sangat sederhana yakni berupa pencatatan pemasukan dan pengeluaran dengan system pencatatan buku, untuk pembayaran uang bulanan siswa SPP.

Sedangkan Dana BOS sudah menggunakan sistem pelaporan melalui aplikasi tersendiri yang semuanya di realisasikan berdasarkan petunjuk teknis pengelolaan dana BOS tersebut untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan disekolah berdasarkan komponen yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk uang bulanan dari siswa digunakan untuk membayar gaji para guru maupun karyawan sekolah.

2. Prinsip-Prinsip Anggaran RAPBS Di SMK Al Washliyah 9 Perbaungan

Penyusunan RAPBS yang baik harus memenuhi prinsip-prinsip umum yang berlaku. Terkait dengan prinsip-prinsip tersebut, adapula hal yang tercakup didalamnya, yaitu: (a) prinsip pembagian wewenang dan tanggungjawab, (b) prinsip pelibatan stakeholder, dan (c) prinsip penentuan program berdasarkan skala prioritas. Ditinjau dari perspektif yang pertama yaitu, prinsip pembagian wewenang dan tanggungjawab, SMK Al Washliyah 9 dalam menyusun RAPBS

mengimplementasikan prinsip tersebut yang mana terjadi pembagian wewenang dan tanggungjawab dari kepala sekolah kepada wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Wewenang yang diberikan adalah melakukan tugas koordinasi, yaitu meminta kepada dewan guru untuk membuat usulan kebutuhan atau program/kegiatan dalam satu tahun anggaran. Namun pembagian wewenang dan tanggungjawab tersebut dalam penyusunan RAPBS masih sebatas verbal dan belum terlembaga dalam bentuk dokumen tertulis yang dituangkan ke dalam kebijakan atau peraturan sekolah.

Di sisi lain, pembagian wewenang dan tanggungjawab berupa pembentukan tim penyusun RAPBS secara tertulis dan formal juga belum dilaksanakan atau belum ada. Selain itu, pada setiap dilaksanakan rapat, kelengkapan dokumen seperti notulensi yang mencatat berita acara penyusunan RAPBS SMK Al Washliyah 9, masih dibuat secara manual dengan menggunakan tulisan tangan. Hal tersebut menunjukkan kurang siapan dan kekurangrapian administrasi di SMK Al Washliyah 9. Sementara itu, notulensi sendiri sebenarnya dapat dibuat secara rapi menggunakan komputer. Ini merupakan aspek-aspek yang perlu diperbaiki di SMK Al Washliyah 9 dalam penyusunan RAPBS. Dari apa yang didapatkan di lapangan menunjukkan bahwa SMK Al Washliyah 9 sudah menerapkan prinsip pertama ini dalam menyusun RAPBS. Salah satu prinsip yang harus dijalankan dalam menyusun RAPBS adalah adanya pembagian wewenang dan tanggungjawab yang jelas dalam sistem manajemen dan organisasi termasuk dalam menyusun RAPBS. Sedangkan dari sisi pencatatan, SMK Al Washliyah 9 harus memperbaiki dengan menggunakan sistem akuntansi yang memadai & anggaran harus ditulis dalam bahasa yang sederhana dan jelas karena untuk meningkatkan akuntabilitas. Sedangkan prinsip yang kedua adalah pelibatan stakeholder. SMK Al Washliyah 9 dalam menyusun RAPBS melibatkan Komite Sekolah, orang tua siswa, dan guru, serta staf tata usaha.

RAPBS merupakan rencana yang menggunakan berbagai macam sumber dana di dalam realisasinya, terutama iuran bulanan dari orang tua siswa. Langkah ini menunjukkan bahwa SMK Al Washliyah 9 sebagai sebuah lembaga pendidikan menyadari pentingnya peran dan kontribusi pihak lain dalam mencapai kemajuan, baik sebagai pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran maupun pihak yang ada di lingkungan sekolah. Yang terakhir adalah prinsip penentuan program berdasarkan skala prioritas. Prinsip penentuan program yang akan dimasukkan ke dalam draf usulan RAPBS dilakukan berdasarkan tingkat urgensinya. SMK Al Washliyah 9 dalam penyusunan RAPBS memprioritaskan program yang berkenaan dengan proses pembelajaran. Di SMK Al Washliyah 9, Guru-guru bidang studi diminta untuk menyusun daftar usulan kebutuhan atau program/kegiatan yang dikoordinir oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum untuk ditentukan mana kebutuhan atau program/kegiatan yang harus diutamakan dan didahulukan berdasarkan padaskala prioritas pelaksanaannya.

3. Langkah-Langkah Penyusunan RAPBS Di SMK Al Washliyah 9 Perbaungan

Langkah-langkah yang harus ada dalam prosedur penyusunan, yaitu (a) mengidentifikasi dan menginventarisasi rencana kegiatan atau program selama satu tahun anggaran (b) menentukan sumber dana untuk rencana kegiatan atau program (c) menyusun kertas kerja berdasarkan rincian kegiatan dan pendapatan ke dalam format yang disetujui. Dalam prosedur penyusunan RAPBS, SMK Al Washliyah 9

mengawali dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi rencana kegiatan atau program. Identifikasi dan inventarisasi yang menyangkut proses pembelajaran dilakukan masing-masing guru bidang studi. Peran Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum di sini sebagai koordinator dan Kepala Sekolah hanya sebagai legislator atau pemberi persetujuan sebelum RAPBS disahkan. Identifikasi dan inventarisasi menjadi bagian dari usaha untuk menghindari terjadinya pengulangan kegiatan/program dan untuk mengantisipasi masa yang akan datang. Dalam mengidentifikasi dan menginventarisasi, diperlukan data yang akurat dan lengkap untuk mendukung semua yang ada didalamnya. Penentuan sumber dana untuk rencana kegiatan atau program merupakan proses berikutnya. Dalam penyusunan RAPBS, sumber dana harus diperhitungkan karena berpengaruh pada kemampuan sekolah untuk membiayai program atau kegiatan.

4. Bentuk Pertanggung Jawaban RAPBS Di SMK Al Washliyah 9 Perbaungan

Manajemen pembiayaan sekolah yang ideal ada dalam suatu sekolah meliputi pertanggungjawaban dan pengawasan. Pengelolaan penyelenggaraan sekolah yang diterapkan harus dengan asas dasar transparansi dan akuntabel. Adapun akuntabilitas pengelolaan pembiayaan pendidikan yang dijalankan pihak sekolah adalah sebuah bentuk kewajiban. Di SMK Al Washliyah 9 untuk pelaporan pertanggungjawaban RAPBS nya dilakukan hanya sebatas kepala sekolah saja. Dan akan disampaikan pada saat rapat dengan pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Di SMK Al Washliyah 9 Kepala sekolah menyampaikan laporan terutama mengenai penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah. Pengevaluasian dilakukan setiap triwulan atau per semester. Dana yang digunakan akan dipertanggung jawabkan kepada sumber dana. Jika dana tersebut diperoleh dari orang tua siswa, maka dana tersebut akan dipertanggung jawabkan oleh kepala sekolah kepada orang tua siswa.

H. Analisis Pengembangan Sekolah Di SMK Al Washliyah 9 Perbaungan

Pengembangan sekolah di SMK Alwasliyah 9 Perbaungan dari wawancara yang peneliti lakukan dapat diketahui sebagai berikut:

1. Pendidikan Karakter

Yaitu dengan Pembentukan Kepribadian Islami, sekolah memiliki tujuan utama untuk mendidik siswa agar menjadi individu yang berakhlak mulia sesuai dengan ajaran agama Islam. Guru menanamkan dan membentuk kepribadian Islami kepada para siswa-siswi dengan mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, kesabaran, keadilan, dan kasih sayang. Hal-hal tersebut tidak hanya ditanamkan saat pelajaran agama saja, tetapi saat pelajaran lain, guru yang mengampu bidang studi menanamkan dan membantu siswa dalam mengembangkan kesadaran moral dan memahami pentingnya bertindak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain itu juga guru mendidik sisiwa agar baik dalam beretika dan moral. Siswa diajarkan tentang pentingnya berperilaku baik, menjaga hubungan yang harmonis dengan orang lain, menghormati hak-hak orang lain, dan bertanggung jawab terhadap tindakan mereka. Hal ini membantu siswa dalam mengembangkan sikap yang baik dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.

Adapaun pendidikan karakter lainnya yaitu, Pembentukan Kepemimpinan. Pendidikan karakter juga berperan dalam pembentukan kepemimpinan di kalangan

siswa. Siswa diajarkan untuk menjadi pemimpin yang adil, berintegritas, dan mampu memimpin dengan contoh yang baik. Pendidikan karakter membantu dalam mengembangkan keterampilan komunikasi, kerjasama, dan kepemimpinan yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin yang efektif di masa depan. Adapun pendidikan karakter yang terakhir yang diterapkan kepada siswa-siswi di SMK alwasliyah 9 Perbaungan adalah pengembangan Empati dan Toleransi. Sekolah sebagai lembaga pendidikan Islam juga harus mendorong siswa untuk mengembangkan sikap empati dan toleransi terhadap perbedaan. Pendidikan karakter membantu siswa memahami dan menghargai keberagaman agama, budaya, dan latar belakang sosial. Hal ini penting dalam menciptakan masyarakat yang inklusif dan saling menghormati. Guru mengemban tugas dalam pendidikan karakter kepada semua siswa-siswi tanpa terkecuali

Pembinaan pendidikan karakter ini dilakukan guru dengan cara:

- a) Menjaga integritas pribadi dan mempraktikkan nilai-nilai karakter yang diinginkan, seperti kejujuran, keteladanan, keadilan, dan kerjasama.
- b) Merancang pembelajaran yang mendorong pemahaman konsep karakter dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk berlatih dan mengembangkan perilaku yang baik.
- c) Memberikan umpan balik yang konstruktif terhadap perilaku siswa terkait dengan nilai-nilai karakter. Dengan memberikan pujian, dorongan, atau koreksi yang tepat, guru dapat membantu siswa memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan meningkatkan kesadaran moral serta tanggung jawab mereka.

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan sumber daya manusia di SMK Alwasliyah 9 Perbaungan dilakukan dengan beberapa cara, sebagai berikut:

- a) Rekrutmen dan Seleksi: Sekolah melakukan proses rekrutmen dan seleksi yang baik untuk mendapatkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas. Proses ini meliputi penyusunan profil kompetensi yang dibutuhkan, pengiklanan lowongan, seleksi yang transparan, dan verifikasi referensi.
- b) Pelatihan dan Pengembangan: Sekolah menyediakan program pelatihan dan pengembangan bagi SDM-nya, baik untuk guru maupun tenaga kependidikan. Pelatihan dapat meliputi peningkatan kompetensi pedagogik, keahlian pengajaran subjek tertentu, pengembangan kepemimpinan, manajemen kelas, dan penggunaan teknologi pendidikan. Pelatihan tersebut dapat dilakukan secara internal maupun melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan atau profesional eksternal.
- c) Evaluasi Kinerja: Sekolah melaksanakan evaluasi kinerja secara berkala terhadap SDM-nya. Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan umpan balik terkait kinerja individu dan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan lebih lanjut. Evaluasi kinerja dilakukan melalui observasi kelas, penilaian kinerja, atau survei kepuasan siswa, orang tua, dan rekan kerja.
- d) Peningkatan Karier: Sekolah menyediakan jalur karier yang jelas dan peluang pengembangan bagi SDM-nya. Hal ini dapat mencakup promosi

jabatan, peningkatan gaji, peluang untuk mengikuti program magister atau doktor, atau partisipasi dalam proyek pengembangan pendidikan.

- e) Pemberdayaan dan Kolaborasi: Sekolah mendorong pemberdayaan SDM dengan memberikan ruang bagi mereka untuk mengambil inisiatif, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan melibatkan mereka dalam pengembangan program dan kebijakan sekolah. Kolaborasi antara SDM, baik dalam sekolah maupun dengan institusi pendidikan dan organisasi terkait, juga dapat meningkatkan kemampuan dan kualitas SDM.

3. Pemanfaatan teknologi sebagai pengembangan sekolah

Pemanfaatan teknologi yang dilakukan di SMK Alwasliyah 9 adalah:

- a) Akses dan Sumber Belajar: Sekolah menggunakan perangkat teknologi seperti komputer, internet, dan perangkat mobile untuk mengakses buku elektronik, materi pembelajaran interaktif, sumber informasi online, dan video pembelajaran. Ini membantu siswa dan guru untuk memperoleh sumber belajar yang lebih beragam dan terkini, meningkatkan kualitas pembelajaran.
- b) Pembelajaran Interaktif: Sekolah menyediakan berbagai aplikasi, perangkat lunak, dan platform pembelajaran digital. Contohnya adalah e-learning, video pembelajaran interaktif, simulasi, dan permainan pendidikan. Pembelajaran interaktif menggunakan teknologi dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa, serta memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik dan berpikir kritis.
- c) Komunikasi dan Kolaborasi: Sekolah dapat menggunakan platform pembelajaran online, forum diskusi, atau alat kolaborasi seperti Google Docs untuk memfasilitasi interaksi dan kerja sama dalam pembelajaran. Hal ini memungkinkan diskusi yang lebih aktif, pembelajaran berbasis proyek, dan kolaborasi tim.
- d) Penilaian dan Umpan Balik: Sekolah menggunakan perangkat lunak penilaian online, ujian berbasis komputer, atau alat penilaian otomatis untuk menyediakan umpan balik cepat dan akurat terhadap prestasi siswa dan juga dapat digunakan untuk melacak kemajuan siswa, menyimpan catatan nilai, dan memfasilitasi analisis data untuk meningkatkan pembelajaran. Pengelolaan Administrasi: Teknologi dapat digunakan untuk mengelola administrasi dan proses manajemen di sekolah. Penggunaan sistem informasi manajemen sekolah (SIMS) atau perangkat lunak keuangan membantu mempermudah pengelolaan data siswa, kehadiran, keuangan, dan administrasi lainnya. Dengan pengelolaan administrasi yang efisien, waktu dan sumber daya dapat dialokasikan lebih baik untuk fokus pada pengembangan pembelajaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian mengenai implementasi perencanaan keuangan (RAPBS) rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah dalam pengembangan sekolah di SMK Al Washliyah 9 Perbaungan, beberapa kesimpulan dapat diambil yaitu bahwa Perencanaan menjadi kunci utama setiap sekolah, Lembaga, maupun organisasi untuk dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya dalam menunjang kebutuhan Lembaga tersebut, baik sarana prasarana, komponen administrasi, dan kebutuhan lainnya. Merencanakan merupakan proses dalam menentukan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada kurun waktu tertentu, baik jangka pendek maupun panjang, agar tujuan yang dicapai dapat maksimal. Bentuk laporan

pertanggungjawaban dari pengelola keuangan dapat dilakukan secara manual dan komputerisasi, dalam hal ini bendahara dibantu oleh operator sekolah. Seluruh transaksi baik pemasukan maupun pengeluaran harus disertai dengan bukti, seperti nota. Adanya laporan pertanggungjawaban pada akhir kegiatan akan digunakan sebagai acuan untuk proses kevalidan data dalam penggunaan dana dengan rencana anggaran yang telah dibuat, ditetapkan dan disepakati pada awal tahun anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbudina. 2003. *Manajemen Pendidikan*. Bogor: Kencana.
- Akbar, Bahrullah. 2013. *Akutansi Sektor Publik: Konsep dan teori*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Baharuddin dan Makin. 2010. *Manajemen Pendidikan Islam*. Malang: UIN Maliki Press.
- Fattah, Nanang. 2004. *Manajemen Landasan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Harsono. 2007. *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.
- Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Nomor 04 Tahun 2016.
- Qomar, Mujammil. tt. *Manajemen Pendidikan Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Suryobroto. 2004. *Manajemen Pendidikan Di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. 2012. *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Yuwono. 2010. *Penganggaran Sektor Publik*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media